

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada tahun 1976, Jensen dan Meckling mengembangkan teori keagenan dalam penelitian yang mereka lakukan. Teori agensi digunakan untuk mendasari praktik bisnis perusahaan dalam mengelola suatu perusahaan tidak dapat dilakukan oleh pemiliknya sendiri melainkan ada campur tangan pihak lain (Kusumawati, 2019). Menurut Horne & Wachowicz (2018), teori keagenan merupakan suatu teori yang berhubungan dengan sikap prinsipal selaku pemilik perusahaan dan agen mereka yaitu manajer pengelola perusahaan. Manajer tersebut ditunjuk dan diangkat oleh pemilik perusahaan untuk dijadikan sebagai perwakilan mereka dalam pengelolaan perusahaan.

Teori keagenan menunjukkan bahwa jika terjadi pemisahan antara kontrol dengan kepemilikan maka dapat menimbulkan perbedaan (Jensen & Meckling, 1976; San Martin Reyna, 2019). Perbedaan yang timbul tersebut dapat memicu potensi konflik antara pihak pengendali perusahaan dengan pemilik perusahaan yang biasa disebut dengan konflik keagenan (*agency problem*) (Kusumawati, 2019). Masalah konflik keagenan yang terjadi pada penelitian ini yaitu pemerintah sebagai prinsipal yang mengandalkan pembayaran pajak sebagai salah satu sumber pemasukan untuk mendanai pengeluaran serta operasional negara sedangkan manajemen sebagai agen berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar laba yang diperoleh tidak berkurang terlalu banyak.

Konflik keagenan ini dapat memicu manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Untuk menghindari terjadinya konflik keagenan, kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Jika selalu terjadi asimetri informasi atau ketidakseimbangan informasi yang didapat oleh kedua belah pihak terkait kondisi perusahaan, maka konflik keagenan ini dapat meningkat terus menerus. Teori keagenan menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat mempengaruhi manajer untuk membuat keputusan mengubah situasi mereka dan memaksimalkan kegunaan yang akhirnya malah jadi merugikan pemangku kepentingan lainnya (Bouaziz *et al.*, 2020). Hal tersebut yang mendorong manajemen melakukan praktik manajemen laba (Y. K. W. Putri, 2019).

Dalam Lestiani & Widarjo (2021), Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan bersesuaian dengan asumsi tiga sifat dasar manusia yaitu manusia memiliki sifat kecenderungan hanya memetingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir yang terbatas terkait persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan manusia selalu berusaha untuk menghindari risiko yang akan terjadi (*risk averse*). Asumsi ini menjelaskan bahwa seorang manajer sebagai manusia tidak menutup kemungkinan untuk bertindak *opportunistic* atau disebut mengutamakan kepentingan pribadi diatas orang lain.

2.2 Manajemen Laba

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia mulai mengenal adanya praktik manajemen laba. Menurut R.A Supriyono (2018) manajemen laba merupakan tindakan untuk mempengaruhi laba yang dilakukan oleh para manajer sesuai dengan tujuannya. Fischer & Rosenzweig (1995) dalam Bouaziz *et al.*, (2020) mendefinisikan manajemen laba sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan dengan memperbesar atau memperkecil laba periode berjalan dalam menyajikan laporan dari unit usaha yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan laba tanpa menimbulkan pertumbuhan yang sesuai dalam keuntungan jangka panjang.

Manajemen laba digambarkan sebagai suatu praktik akuntansi yang dirancang untuk menyiapkan serta mengungkapkan angka-angka yang berbeda dari yang telah disiapkan untuk diungkapkan jika praktik tersebut tidak diambil. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam laporan keuangan dan ketika menyusun transaksi bertujuan mengubah laporan keuangan agar dapat mempengaruhi hasil kontrak yang berkaitan dengan angka-angka yang dilaporkan (Martinez & Carvalho, 2021). Manajemen yang telah terbukti melakukan praktik manajemen laba akan dapat kehilangan kepercayaan yang nantinya mengarah kepada meningkatnya kewaspadaan pemangku kepentingan (Astari *et al.*, 2020).

Scott (2015) menyatakan bahwa terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer melakukan manajemen laba, diantaranya laporan yang

digunakan untuk pemberian informasi kepada investor. Investor cenderung melihat laporan keuangan untuk menilai suatu perusahaan pada saat sekitar waktu pergantian CEO. Tujuannya adalah untuk melihat kinerjanya dapat dinilai baik oleh para *stakeholder*. Pada saat penawaran saham perdana atau *initial public offerings* (IPO) agar investor merespon dengan positif atas saham yang ditawarkan. Motivasi manajer untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba, motivasi kontraktual atau pelanggaran perjanjian hutang, dan motivasi pajak dimana manajer cenderung berupaya untuk meminimalisir seluruh kewajiban pajak agar pajak yang dibayar nantinya rendah dan yang terakhir terdapat motivasi politik (Mahrani & Soewarno, 2018).

Ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan oleh manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan keinginannya antara lain: *taking a bath*, dimana bentuk rekayasa laba yang terjadi pada saat pergantian struktur organisasi dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar agar periode selanjutnya mendapatkan laba yang meningkat. *Income minimization*, yang biasanya digunakan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi sehingga ketika laba pada periode selanjutnya telah diperkirakan akan menurun banyak, maka dapat diatasi dengan mengambil laba dari periode sebelumnya. Selain itu ada juga *income maximization*, teknik rekayasa yang digunakan saat laba perusahaan mengalami penurunan. *Income smoothing* yaitu melakukan rekayasa laba dengan meratakan laba dengan tujuan untuk laporan kepada pihak eksternal terutama investor, karena biasanya investor lebih tertarik dengan laba yang relatif stabil (Sulistyanto, 2008).

Secara umum, untuk mendeteksi manajemen laba dapat diukur dengan tiga model pendekatan, antara lain model berbasis *specific accrual* yang menggunakan pendekatan menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba, menggunakan komponen dalam laporan keuangan tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri tertentu. Model berbasis *distribution of earnings after management* yang berfokus pada pergerakan laba disekitar *benchmark* yang dipakai misalnya laba kuartal sebelumnya untuk menguji apakah *incidence* jumlah yang berada diatas maupun dibawah *benchmark* didistribusikan secara merata atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat. Terakhir ada model berbasis *aggregate accrual* yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba, di model ini terdapat beberapa model lagi yaitu model Healy, model DeAngelo, model Jones, dan model Jones modifikasi (Sulistyanto, 2008).

Dari berbagai model diatas, hanya model berbasis *aggregate accruals* yang memberikan hasil cukup kuat dalam mendeteksi keberadaan manajemen laba dan sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang telah banyak digunakan di beberapa negara serta menggunakan seluruh komponen laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). Pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Jones yang telah dimodifikasi (*Modified Jones Model*) diproksikan dengan *discretionary accrual* karena model ini sudah banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan dinilai menjadi model yang paling baik dibanding dengan model lain dalam mendeteksi manajemen laba

serta memberikan hasil yang paling *rebust* (Bangun, 2020). Model perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung total *accrual* dengan rumus:

$$TAC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

- 2) Selanjutnya, menghitung *Non Discretionary Accrual* (NDA) dengan rumus:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

- 3) Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, kemudian dilakukan perhitungan *non discretionary accrual* (NDA) dengan rumus:

$$NDA_{it} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{i,t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{i,t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{i,t-1}} \right)$$

- 4) Menghitung nilai *discretionary accrual* dengan persamaan:

$$DA_{it} = \left(\frac{TAC_{it}}{A_{i,t-1}} \right) - NDA_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} : Total *accruals* perusahaan i pada periode t

N_{it} : Laba bersih komprehensif perusahaan i pada periode t

CFO_{it} : Aliran kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

A_{it-1} : Total asset perusahaan i pada periode t-1

ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_{it} : Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t

NDA_{it} : *Non discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

2.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) didefinisikan sebagai langkah awal dalam melakukan manajemen pajak sehingga melakukan manajemen laba dengan tujuan dapat membayar pajak lebih rendah (Kusumawati, 2019). Menurut Chairil Anwar (2013) dalam Sari *et al.*, (2019) perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau strategi merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak perusahaan masih berada dalam jumlah minimal tetapi hal ini dilakukan masih dalam jangkauan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perencanaan pajak masih menjadi tindakan yang legal.

Secara umum tujuan dari perencanaan pajak antara lain untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya *tax surprise* jika ada pemeriksaan pajak oleh fiskus, dan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat juga bisa memperoleh manfaat yaitu menghemat kas keluar dan *cash flow* lebih bisa teratur karena perencanaan pajak yang matang dapat memperkirakan besar kas yang dibutuhkan untuk pajak (Pohan, 2014).

Pengukuran perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan rumus *tax retention rate* (tingkat retensi pajak), yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada suatu laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild *et al.*, 2004). Nilai efektivitas manajemen pajak pada penelitian ini adalah ukuran efektivitas perencanaan pajak.

Rumus *tax retention rate* adalah (Wild *et al.*, 2004):

$$TRR_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} : *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak perusahaan i pada tahun t.

$Net\ Income_{it}$: Laba bersih perusahaan i pada tahun t.

$Pretax\ Income\ (EBIT)_{it}$: Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t.

2.4 Free Cash Flow

Free cash flow merupakan kas perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau pihak kredit setelah berbagai kegiatan investasi, operasional, dan modalnya telah dipenuhi dan diselesaikan oleh perusahaan (Nekhili *et al.*, 2016). Menurut Jensen (1986), *free cash flow* didefinisikan sebagai aliran kas yang merupakan sisa dari pendanaan seluruh proyek yang menghasilkan *net present value* (NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan.

Free cash flow menggambarkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam keadaan yang buruk sehingga semakin besar *free cash flow* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula kemampuannya untuk bertahan dari keadaannya yang buruk. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan memiliki *free cash flow* yang kecil dipastikan memerlukan sumber pendanaan baru untuk memenuhi kebutuhan membiayai investasi dan modal untuk kegiatan operasionalnya (Warren *et al.*, 2018).

Dalam penelitian ini *free cash flow* diperoleh dari selisih arus kas aktivitas operasi dan arus kas aktivitas investasi. Kemudian, nilai tersebut dibagi dengan total aset pada periode yang sama dengan tujuan agar menjadi lebih *comparable* bagi perusahaan (Warren *et al.*, 2018).

Rumus *free cash flow* adalah sebagai berikut:

$$FCF = \frac{\text{Arus Kas Operasi} - \text{Arus Kas Investasi}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.5 Good Corporate Governance (GCG)

Komite Cadbury dalam Rajeevan & Ajward (2020) mendefinisikan tata kelola atau *corporate governance* sebagai sebuah sistem yang perusahaannya dikendalikan dan diarahkan secara khusus berfokus kepada pembentukan kerangka kerja dimana kepenringan pemangku seimbang. Konsep ini diadakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka aturan.

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang akan menciptakan nilai tambah (*added value*) kepada semua *stakeholder* (Monks, 2018). GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan (Mahrani & Soewarno, 2018).

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip *good corporate governance* diterapkan dengan baik pada setiap aspek bisnis serta semua jajaran perusahaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 pasal 3, prinsip *good corporate governance* antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang mekanisme dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun, dalam praktiknya agar terjamin terselenggaranya *good corporate governance* diperlukan organ tambahan seperti dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit.

Penelitian ini menggunakan satu organ tambahan dari penerapan *good corporate governance* sebagai proksi variabel moderasi, yaitu komite audit. Komite audit diharapkan mampu memberikan penilaiannya terhadap kualitas laporan laba perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan manajemen sehingga nantinya laporan keuangan tersebut dapat diandalkan, selain itu juga agar dapat meminimalisir manajemen untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang terdapat

di perusahaan. Dilihat dari peraturan BAPEPAM No. IX.I.5 dikatakan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen serta pihak eksternal yang independen.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan daftar penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian praktik manajemen laba.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Analisis Financial Distress dan Free Cash Flow dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi Terhadap Manajemen Laba (Bella Nabila Lukita Putri & Rachmawati, 2018)	X1: <i>Financial Distress</i> X2: <i>Free Cash Flow</i> M: Dewan Komisaris Independen Y: Manajemen Laba	<i>Financial Distress</i> berkaitan positif signifikan dengan Manajemen laba, kemudian untuk <i>Free Cash Flow</i> tidak berkaitan dengan Manajemen Laba dan Dewan Komisaris Independen hanya mampu memoderasi <i>Free Cash Flow</i> pada manajemen laba.
2	Determinan Manajemen Laba Akrual pada Indeks LQ45 dan JII Periode 2010-2015 (Rina Trisnawati, Mardyaningrum, Laillatul Khotimah, 2018)	X1: Kepemilikan Institusional X2: Kepemilikan Manajerial X3: Dewan Komisaris Independen X4: Komite Audit X5: <i>Leverage</i> X6: <i>Free Cash Flow</i> Y: Manajemen Laba	Mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual, hanya <i>leverage</i> dan <i>free cash flow</i> yang berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba akrual.

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
3	Implikasi Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan pada Manajemen Laba (Octavia, 2018)	X1 : Komisaris Independen X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Manajerial X4: Komite Audit X5: Ukuran Perusahaan Y : Manajemen Laba	Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan
4	Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Lestari & Murtanto, 2018)	X1 : Efektivitas Dewan Komisaris X2 : Efektivitas Komite Audit X3 : Kepemilikan Terkonsentrasi X4 : Kepemilikan Manajerial X5 : Kepemilikan Institusional X6 : Kualitas Audit Y : Manajemen Laba	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif, sedangkan efektivitas komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh.
5	Pengaruh <i>tax planning</i> , beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri barang konsumsi di BEI tahun 2012-2016 (Irsan Lubis dan Suryani, 2018)	X1 : <i>Tax Planning</i> X2 : Beban Pajak Tangguhan X3 : Ukuran Perusahaan Y : Manajemen Laba	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>tax planning</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
6	<p>Pengaruh Free Cash Flow dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di BEI</p> <p>(Kodriyah dan Fitri, 2018)</p>	<p>X1 : Perencanaan Pajak X2 : <i>Leverage</i> Y : Manajemen Laba</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>free cash flow</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
7	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Konvergensi IFRS dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba</p> <p>(Sri Ayem & Putri Husna Nur Arifah, 2019)</p>	<p>X1: Ukuran Perusahaan X2: Konvergensi IFRS X3: Perencanaan Pajak Y: Manajemen Laba</p>	<p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba dan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>
8	<p>Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2012-2017</p> <p>(Riska Nirwana Sari, Arief Tri Hardiyanto, Patar Simamora, 2019)</p>	<p>X1: Beban Pajak Tangguhan X2: Perencanaan Pajak X3: Profitabilitas Y: Manajemen Laba</p>	<p>Beban pajak tangguhan dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan, sedangkan perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
9	<p>Determinan Manajemen Laba: Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur <i>Go-Public</i> di BEI</p> <p>(Eny Kusumawati, 2019)</p>	<p>X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Free Cash Flow</i> X3: Profitabilitas X4: Ukuran Perusahaan X5: Perencanaan Pajak X6: Kepemilikan Manajerial X7: Kepemilikan Institusional X8: Dewan Komisaris Independen X9: Komite Audit X10: Kualitas Audit Y: Manajemen Laba</p>	<p>Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit, <i>leverage</i>, <i>free cash flow</i>, profitabilitas, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>
10	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)</p> <p>(Fatchan Achyani & Susi Lestari, 2019)</p>	<p>X1: Perencanaan Pajak X2: Beban Pajak Tangguhan X3: Aset Pajak Tangguhan X4: Kepemilikan Manajerial X5: <i>Free Cash Flow</i> Y: Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan hanya <i>free cash flow</i> yang berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh.</p>
11	<p>Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba</p> <p>(Randi Febrian, Tertianto Wahyudi, dan Ahmad Subeki, 2019)</p>	<p>X1: Perencanaan Pajak X2: Beban Pajak Tangguhan Y: Manajemen Laba</p>	<p>Hasil menunjukkan perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara signifikan.</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
12	<p>The Effect of CSR Disclosure, Corporate Governance Mechanism, Auditor Independence, Auditor Quality, and Firm Size on Earning Management</p> <p>(Wahyono, Adrian Nur Novianto, dan Eskasari Putri, 2019)</p>	<p>X1: CSR Disclosure X2: Dewan Komisaris Independen X3: Independensi Auditor X4: Kualitas Audit X5: Ukuran Perusahaan Y: Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR Disclosure, Corporate Governance Mechanism, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.</p>
13	<p>The Effect of Good Corporate Governance Mechanism and Corporate Social Responsibility on Financial Performance With Earnings Management as Mediating Variable.</p> <p>(Mahrani & Soewarno, 2019)</p>	<p>X1: Mekanisme GCG X2: CSR Y1: Kinerja Keuangan Y2: Manajemen Laba M: Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme GCG dan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan manajemen laba. Mekanisme GCG dan CSR terbukti signifikan. Sedangkan hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan namun dapat memediasi pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan.</p>
14	<p><i>The Effect of Tax Planning, Ownership Structure, and Deferred Tax Expense on Earning Management</i></p> <p>(Mudjiyanti, 2019)</p>	<p>X1 : <i>Tax Planning</i> X2 : <i>Ownership Structure</i> X3 : <i>Deferred Tax Expense</i> Y : <i>Earning Management</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tax planning</i> dan <i>deferred tax expense</i> berpengaruh terhadap <i>earning manajemen management</i>, sedangkan <i>ownership structure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>earning management</i>.</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
15	<p><i>How The Effect Of Deferred Tax Expenses And Tax Planning On Earning Management ?</i></p> <p>(Diyah Purnamasari, 2019)</p>	<p>X1 : Beban Pajak Tangguhan X2 : Perencanaan Pajak Y : Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.</p>
16	<p>Board Characteristics and Earnings Management in Sri Lanka</p> <p>(Shanmugavel Rajeevan & Roshan Ajward, 2020)</p>	<p>X1: Ukuran Dewan X2: Independensi Dewan X3: Dualitas CEO X4: Rapat Dewan X5: Board Expertise X6: Komite Audit X7: Independensi Komite Audit X8: Rapat Komite Audit X9: Keterampilan Komite Audit Y: Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dualitas CEO yang berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh.</p>
17	<p>Effect off Bid Ask Spread, Profitability, Free Cash Flow on Earnings Management</p> <p>(Nurainun Bangun, 2020)</p>	<p>X1: Bid Ask Spread X2: Profitabilitas X3: Free Cash Flow Y : Manajemen Laba</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bid ask spread dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba sedangkan <i>free cash flow</i> tidak berpengaruh</p>
18	<p>Effect of audit committee independence, board ethnicity and family ownership on earnings management in Malaysia</p> <p>(Wan Mohammad & Wasiuzzaman, 2020)</p>	<p>X1: Independensi Komite Audit X2: Etnis Dewan M: Kepemilikan Keluarga Y : Manajemen Laba</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa peran independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Meskipun demikian, kepemilikan keluarga ditemukan mengurangi aktivitas manajemen laba. Temuan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan lebih efektif di perusahaan keluarga negara berkembang.</p>

No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
19	Audit Committee Characteristics and Tax Aggressiveness (Deslandes <i>et al.</i> , 2020)	X1: Independensi Komite Audit X2: Keahlian Komite Audit X3: Ketekunan Komite Audit X4: Keragaman Gender Komite Audit Y: Agresivitas Perencanaan Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya keahlian dan ketekunan komite audit yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas perencanaan pajak.
20	<i>Audit committee, internal audit function and earnings managementL evidence from Jordan</i> (Alzoubi, 2020)	X1 : Komite Audit X2 : Internal Audit Function X3 : Pertemuan Antara Komite Audit dan IAF	Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dan fungsi audit internal mengurangi tingkat manajemen laba.
21	<i>Effect of Tax Planning on Profit Management in Registered Food and Beverage Sub Sector Manufacturing Companies On the Indonesia Stock Exchange</i> (Hanum & Muda, 2021)	X1 : Perencanaan Pajak Y : Manajemen Laba	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
22	Kompensasi Bonus dan Manajemen Laba Rill: Peran Moderasi Komite Audit (Lestiani & Widarjo, 2021)	X1 : Kompensasi Bonus M : Efektivitas Komite Audit Y : Manajemen Laba	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi bonus memiliki pengaruh yang positif signifikan dan efektivitas komite audit belum mampu memperlemah atau mereduksi pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba.

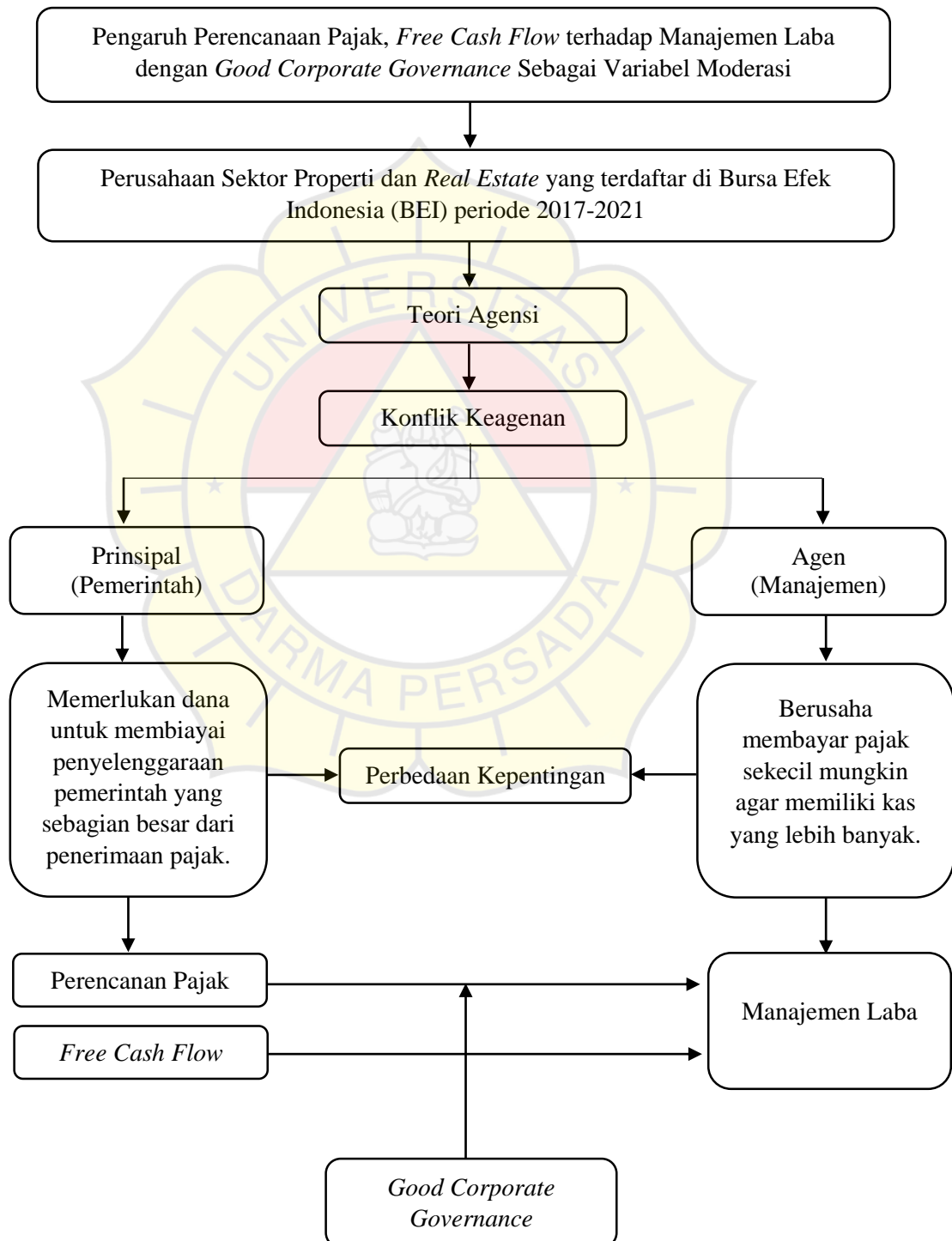
No	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
23	Accrual Earnings Management: Evidence from IPOs Firms in Indonesia (Januri, 2021)	X1 : Asimetri Informasi X2 : Kepemilikan Manajerial M : Komite Audit Y : Manajemen Laba	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan. Komite audit belum mampu memoderasi pengaruh asimetri informasi dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa variabel diatas, maka dapat diuraikan hubungan antara perencanaan pajak, *free cash flow*, dan *good corporate governance*. Penelitian ini didasarkan oleh teori keagenan atau agensi yang menjelaskan tentang benturan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen. Dalam penelitian ini yang menjadi prinsipal adalah regulator (pemerintah) yang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Sedangkan, menurut agen (manajemen) pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga manajemen akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin agar memiliki kas yang lebih banyak untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Konflik-konflik tersebut akan memicu adanya *free cash flow* dan perencanaan pajak. Hal tersebut yang akhirnya mendorong adanya praktik manajemen laba. Dalam hal ini, pemerintah

berharap dengan adanya *good corporate governance* (GCG) dapat meminimalisir adanya perencanaan pajak yang berlebihan oleh perusahaan.

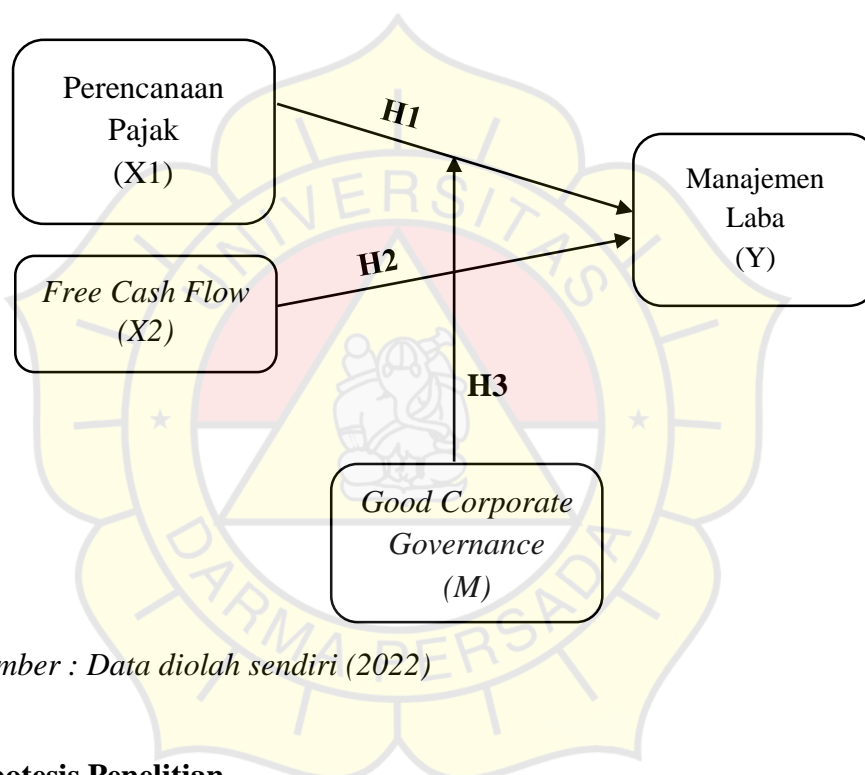
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Model Konseptual

Model variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan dimoderasi oleh *good corporate governance* dengan model sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Konseptual



Sumber : Data diolah sendiri (2022)

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang nantinya akan dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis serta menegaskan hubungan yang diperkirakan sehingga masalah-masalah yang dihadapi akan ada solusinya. Penelitian ini mempunyai 4 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, pengaruh *free cash flow* terhadap manajemen

laba, pengaruh *good corporate governance* memoderasi perencanaan pajak terhadap manajemen laba dan pengaruh *good corporate governance* memoderasi *free cash flow* terhadap manajemen laba.

2.9.1 Perencanaan pajak dan Manajemen Laba

Perencanaan pajak menjadi tindakan awal yang dilakukan oleh perusahaan sebelum melakukan pembayaran pajak (Kusumawati, 2019). Hubungan perencanaan pajak dan manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Perencanaan pajak timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut yaitu perusahaan yang berusaha membayar pajak seminimal mungkin agar laba yang diperoleh tidak berkurang terlalu banyak, sedangkan pemerintah mengandalkan pembayaran pajak untuk mendanai pengeluaran serta operasional negara. Sehingga semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar perusahaan melakukan manajemen laba (Ayem & Arifah, 2019).

Hal ini didukung dengan penelitian oleh Febrian *et al.* (2019), Mudjiyanti (2019), dan Ayem & Arifah (2019) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Mudjiyanti (2019) menyatakan bahwa ketika perusahaan memiliki kinerja bisnis yang baik, maka beban pajak akan relatif lebih rendah serta melemahkan motivasi penghindaran pajak dalam manajemen laba. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah, motivasi penghindaran pajaknya secara bertahap berkurang seiring dengan peningkatan kinerja bisnis. Diyah Purnamasari (2019) juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Achyani & Lestari (2019) dan Ayem & Arifah (2019) justru menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan di dalam perusahaan manufaktur terdapat beberapa divisi atau departemen dengan masing-masing manajemen yang memiliki kepentingan masing-masing dalam hal untuk melakukan oportunistik manajemer. Sehingga manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena *self interest* manajemen bukan karena perencanaan pajak yang menjadi kepentingan *principal* itu sendiri. Penelitian oleh Sari *et al.* (2019) juga menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan tarif pajak tunggal untuk wp badan turun menjadi 25% dari yang semula 28%, sehingga manajer tidak dapat memaksimalkan peluang untuk melakukan manajemen laba. Hanum & Muda (2021) juga menemukan bahwa semakin tinggi atau rendahnya perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini tidak akan berdampak pada besarnya manajemen laba pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H₁ : Perencanaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

2.9.2 *Free Cash Flow* dan Manajemen Laba

Hubungan antara *free cash flow* dengan manajemen laba didasarkan pada teori agensi yaitu terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu konflik yang kerap terjadi berkaitan dengan penggunaan *free cash flow* perusahaan.

Perbedaan kepentingan ini dimulai dari pemegang saham yang menginginkan *free cash flow* pada perusahaan bernilai besar sehingga imbalan dividen yang mereka terima besar juga, akan tetapi jika perusahaan memiliki *free cash flow* yang tinggi terkadang dapat menjadikan kinerja perusahaan kurang baik karena dinilai tidak mampu memanfaatkan kekayaan secara optimal (Achyani & Lestari, 2019). Disisi lain pihak manajemen akan berupaya untuk menutupi kinerja yang kurang optimal agar nantinya manajemen berhasil mendapatkan *reward* apabila perusahaan memiliki kinerja yang baik dan inilah yang mendorong adanya aktivitas manajemen laba (Bangun, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati *et al.* (2018) menemukan bahwa *free cash flow* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mampu meningkatkan harga sahamnya yang berdampak pada praktik manajemen laba akrual akan berkurang karena fokus manajemen adalah melakukan ekspansi bisnis dan deversifikasi produk yang didukung oleh nilai *free cash flow* yang tinggi. Kodriyah & Fitri (2018) dan Achyani & Lestari (2019) menemukan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *free cash flow* yang tinggi juga

cenderung melakukan praktik manajemen laba dengan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal sehingga kinerja perusahaan dapat terlihat baik. Selain itu, penelitian oleh Kusumawati (2019) juga menemukan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba terjadi karena adanya motivasi manajemen dalam memanfaatkan arus kas bebas yang tinggi untuk melakukan investasi yang terkadang tidak menguntungkan sehingga laba yang dilaporkan jadi rendah. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Rachmawati (2018) dan Bangun (2020) yang menunjukkan bahwa *free cash flow* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian didapatkan hipotesis kedua dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: *Free cash flow* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.9.3 Good Corporate Governance Memoderasi Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Good corporate governance merupakan salah satu cara yang mampu menentukan arah dan cara untuk melaksanakan kontrol agar kegiatan operasional dalam suatu perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan oleh seluruh pihak yang ada (Putri & Rachmawati, 2018). Komite audit merupakan salah satu bentuk perwujudan *good corporate governance* yang mampu meminimalisir tindakan oportunistik manajemen. Sesuai dengan tugas pokoknya yaitu membantu dewan komisaris dalam

melakukan fungsi pengawasan, komite audit dinilai mampu untuk memastikan bahwa kualitas laporan keuangan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta diharapkan dapat meningkatkan sikap akuntabilitas dan transparansi pada perusahaan (Lestiani & Widarjo, 2021).

Penelitian ini telah dilakukan oleh Wahyono *et al.* (2019) yang menemukan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan meskipun komposisi komisaris independen pada perusahaan relatif besar, namun mereka tidak dapat sepenuhnya independen dalam menjalankan tugasnya karena dibatasi oleh kebijakan pemegang saham mayoritas sehingga pelaksanaan GCG tidak berjalan secara optimal. Sedangkan penelitian oleh Mahrani & Soewarno (2018) menemukan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen yang banyak mampu memberikan pengawasan yang lebih kepada manajemen untuk mengelola perusahaannya dengan lebih baik. Selain itu terdapat penelitian oleh Octavia (2018) dan Eny Kusumawati (2019) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa fungsi komite audit dalam perusahaan sudah cukup luas dalam melakukan monitoring terhadap pelaporan dan penyusunan laporan keuangan sehingga motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba dapat dikurangi. Sedangkan penelitian oleh Rajeevan & Ajward (2020) menemukan bahwa komite audit

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian oleh Wan Mohammad & Wasiuzzaman (2020) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, penelitian oleh Lestari & Murtanto (2018) juga menunjukkan bahwa efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini disebabkan karena pembentukan komite audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan yang seharusnya dapat membantu fungsi pengawasan dari dewan komisaris hanya bersifat mandatory saja agar dapat memenuhi peraturan yang berlaku. Selain itu, Alzoubi (2020) menunjukkan bahwa komite audit dan fungsi audit internal mampu mengurangi tingkat manajemen, hal ini memberikan bukti jika sebuah perusahaan mempertahankan komite audit yang efektif dan membentuk fungsi audit internal yang baik akan memiliki tingkat manajemen laba yang lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Januri (2021) dan Lestiani & Widarjo (2021) menunjukkan bahwa komite audit belum mampu memoderasi pengaruh asimetri informasi, kepemilikan manajerial, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja komite audit dalam monitoring tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan masih belum optimal serta keberadaan komite audit hanya memenuhi pemenuhan kewajiban pengungkapan laporan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka di dapatkan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh positif Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba.